

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia mendirikan BUMN dengan dua tujuan utama, yaitu tujuan yang bersifat ekonomi dan tujuan yang bersifat sosial. Dalam tujuan yang bersifat ekonomi, BUMN dimaksudkan untuk mengelola sektor-sektor bisnis strategis agar tidak dikuasai pihak-pihak tertentu. Bidang-bidang usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti perusahaan listrik, minyak dan gas bumi, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 UUD 1945, seyogyanya dikuasai oleh BUMN.

Dengan adanya BUMN diharapkan dapat terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang berada di sekitar lokasi BUMN. Tujuan BUMN yang bersifat sosial antara lain dapat dicapai melalui penciptaan lapangan kerja serta upaya untuk membangkitkan perekonomian lokal. Penciptaan lapangan kerja dicapai melalui perekrutan tenaga kerja oleh BUMN. Upaya untuk membangkitkan perekonomian lokal dapat dicapai dengan jalan mengikut-sertakan masyarakat sebagai mitra kerja dalam mendukung kelancaran proses kegiatan usaha. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk memberdayakan usaha kecil, menengah dan koperasi yang berada di sekitar lokasi BUMN

Namun dalam kurun waktu 50 tahun semenjak BUMN dibentuk, BUMN secara umum belum menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Perolehan laba yang dihasilkan masih sangat rendah. Sementara itu, saat ini Pemerintah Indonesia masih harus berjuang untuk melunasi pinjaman luar

negeri yang disebabkan oleh krisis ekonomi tahun 1997 lalu. Dan salah satu upaya yang ditempuh pemerintah untuk dapat meningkatkan pendapatannya adalah dengan melakukan privatisasi BUMN (Zulham umar's, 2010).

Kendala yang dihadapi BUMN tidak terlepas dari intervensi berlebihan dari pemerintah yang tidak memiliki kompetensi utama dalam berbisnis sehingga terjadi ketidakprofesionalan dalam pengelolaan BUMN, karena itu perlu dilakukan suatu upaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan salah satunya melalui privatisasi (Dwidjowijoto dan Wrihatnolo, 2008).

Privatisasi BUMN pertama kali dilakukan di Indonesia pada tahun 1991 dengan cara menjual 27% saham PT Semen Gresik di pasar modal Indonesia dan pasar modal Amerika. Kemudian privatisasi dilanjutkan pada tahun 1994 hingga 1997 dengan mencatatkan (listing) 5 BUMN besar di pasar modal (Bastian, 2002;198-202). Tercatat sebanyak 22 BUMN telah diprivatisasi hingga tahun 2007 dan terus diusulkan penambahan jumlah BUMN yang diprivatisasi tiap tahunnya. Artinya, kepemilikan pemerintah terhadap BUMN semakin berkurang. (Rahmani, 2008).

Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero, meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan, menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat, menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif, menciptakan Persero yang berdaya saing dan berorientasi global, menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar (UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN).

D'Souza, Megginson dan Nash (2004) melakukan studi terhadap determinan potensial perubahan kinerja BUMN setelah privatisasi yaitu faktor karakteristik perusahaan dan institusional (faktor makro ekonomi). Menurut mereka, pengaruh fundamental dari privatisasi pada level perusahaan adalah perubahan kepemilikan yaitu berkurangnya kepemilikan saham oleh pemerintah. Dengan perubahan kepemilikan ini privatisasi meredefinisi misi dan tujuan perusahaan dimana sebelum privatisasi BUMN mengejar tujuan-tujuan yang seringkali bertentangan dengan maksimalisasi profit. Oleh karena itu tingkat kepemilikan yang dipertahankan oleh pemerintah setelah privatisasi seharusnya berpengaruh terhadap perubahan kinerja BUMN yang baru diprivatisasi karena hadirnya swasta akan mengurangi intervensi pemerintah secara langsung. (Kusumawati, 2007).

Berdasarkan studi terdahulu, penelitian ini mencoba memberikan bukti empiris tentang pengalaman privatisasi di Indonesia dengan membandingkan kinerja keuangan dan operasional sebelum dan sesudah privatisasi yang mencakup periode tiga tahun sebelum dan tiga tahun sesudah privatisasi. Untuk yang diprivatisasi tahun 2002 hanya mencakup periode dua tahun sebelum dan sesudah privatisasi. Selanjutnya, penelitian ini juga menguji pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap perubahan kinerja keuangan dan operasional untuk mengetahui apakah kepemilikan pemerintah merupakan faktor yang mempengaruhi perubahan kinerja keuangan dan operasional tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan purposive sampling dengan kriteria BUMN yang diprivatisasi melalui IPO dan mempunyai data akuntansi dan keuangan minimum dua tahun sebelum dan sesudah privatisasi. Berdasarkan

kriteria tersebut, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah BUMN yang diprivatisasi melalui Initial Public Offering (IPO) selama periode 1991-2009. Untuk mengukur kinerja keuangan dan operasional digunakan delapan variabel sebagai indikator yaitu profitability (ROS, ROA, ROE), leverage, output, operating efficiency (sales efficiency dan net income efficiency), dan employment. (Kusumawati, 2007).

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dilakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Kepemilikan Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan BUMN yang Diprivatisasi"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap kinerja keuangan BUMN yang diprivatisasi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap kinerja keuangan BUMN yang diprivatisasi.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh bagi beberapa pihak dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi penulis, dengan melakukan penelitian ini penulis memperoleh pengalaman dan ilmu pengetahuan mengenai cara menganalisis pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap kinerja keuangan BUMN yang diprivatisasi, serta mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama belajar di bangku kuliah.
2. Bagi pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas kebijakan program privatisasi BUMN di Indonesia sehingga tujuan privatisasi BUMN dapat tercapai sesuai dengan yang seharusnya.
3. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini bisa menjadi referensi untuk mengetahui pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap kinerja keuangan BUMN yang diprivatisasi. Serta sebagai informasi untuk meningkatkan pemahaman mengenai privatisasi sehingga mampu mengarahkan respon terhadap privatisasi secara bijaksana.
4. Bagi pengembangan keilmuan, sebagai tambahan pengetahuan dan informasi mengenai privatisasi BUMN di Indonesia khususnya pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap kinerja keuangan BUMN yang diprivatisasi dan meningkatkan perhatian terhadap topik ini yang diharapkan mampu mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4 Batasan Penelitian

Ruang lingkup kajian penelitian ini terbatas pada BUMN di Indonesia yang diprivatisasi melalui IPO. Sedangkan periode penelitian ini yaitu 2007-2010, yang diharapkan dapat menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.

Selain itu, pengukuran kinerja keuangan pada BUMN di Indonesia yang privatisasi dikhususkan pada rasio profitabilitas, *operating efficiency*, *output*, solvabilitas dan likuiditas.

